

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional pada umumnya dilakukan oleh negara-negara yang sudah merdeka dan mempunyai daulat penuh atas negaranya sendiri. Setiap negara mempunyai berbagai macam perbedaan dengan negara lain, seperti dari masyarakat, budaya, struktur pemerintah, maupun kepentingan negara. Perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan suatu kebutuhan yang menyebabkan terjadinya hubungan internasional tersebut. Setiap negara yang berdaulat akan sulit untuk mempertahankan kedaulatannya apabila negara tersebut tidak menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Hubungan internasional diperlukan karena setiap negara itu sama halnya seperti manusia, saling bergantung satu sama lain dalam hal memenuhi semua kebutuhan dan menjaga kedaulatan negaranya.

Hubungan internasional ini tidak hanya diperlukan oleh negara yang berkembang, tetapi juga negara maju. Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai hubungan internasional dengan negara lain yang dilandasi oleh persamaan derajat dan dilandasi pada kemajuan serta persetujuan dari beberapa atau semua negara. Indonesia sendiri menjalin kerjasama dengan beberapa negara di dunia dan dengan berbagai lembaga internasional yang penting, salah satunya Amerika Serikat. Hubungan ini tidak lepas dari kenyataan bahwa Amerika Serikat merupakan pusat dari seluruh negara dengan kekuatan yang sangat besar, bahkan menjadi satu-satunya negara adikuasa.

Selain dengan Amerika Serikat, Indonesia juga menjalin kerjasama dengan benua terkecil di dunia, Australia. Indonesia menyetujui kerjasama ekonomi dengan Australia dengan mengekspor minyak bumi mentah, teh, kacang-kacangan, kopi, dan buah-buahan. Sedangkan Indonesia mendapat barang impor seperti hasil penyulingan minyak, gandum, seng, susu, *cream*, lembaran besi, dan baja. Australia juga pernah menggarap proyek pembuatan jalan raya di Kalimantan Barat, antara Kota Ngabang dan Songan, sepanjang 86 km yang disebut Kalbar Indonesia-Australian Road Project (KIARP).

Namun menurut bbc.co.uk/indonesia, diketahui bahwa Australia telah melakukan penyadapan terhadap beberapa pejabat Indonesia sejak tahun 2007.

Penyadapan ini memang yang terbuka 2007-2009, tetapi dari informasi yang kita terima bahwa ada data-data yang terjadi pelanggaran pada kurun waktu itu," kata Kepala BIN Marciano Norman. Dugaan penyadapan Australia, diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris.

Penyadapan ini menyebabkan hubungan antara kedua negara tersebut merenggang. Indonesia memutuskan beberapa kerjasama yang telah terjalin dengan Australia. Pihak Australia sendiri mengakui bahwa telah melakukan penyadapan terhadap Indonesia, namun Australia enggan meminta maaf karena tindakan tersebut merupakan tindakan lumrah yang dilakukan oleh beberapa negara.

Alasan Australia menyadap Indonesia karena Australia memiliki ketergantungan kepada Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen (Purn) Sudrajat kepada merdeka.com.

Salah satu alasan utama Australia menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena Indonesia dianggap negara penting. Penyadapan dari Australia ini pun tak hanya dilakukan kepada SBY, namun diketahui juga pada istri SBY, Ani Yudhoyono dan beberapa pejabat penting lainnya sejak tahun 2009 silam. Lanjut Sudrajat, alasan penyadapan tersebut sangatlah masuk akal. Sebab, Indonesia dinilai merupakan negara tetangga dekat yang paling maju dari Australia.

Indonesia mengalami kerugian selama disadap oleh Australia. Pihak Indonesia meminta Australia untuk mengatasi kerugian selama penyadapan yang dilakukan oleh Australia, karena apabila Australia tidak mengganti semua kerugian, baik moril ataupun materiil selama penyadapan, ditakutkan akan berdampak pada hubungan antara kedua belah negara yang akan semakin memburuk, bahkan sampai memutuskan hubungan kedua negara. Karena hal ini menarik, peneliti mencoba untuk meneliti kasus spionase tersebut.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbot membela negaranya sendiri dari berbagai tuduhan yang diterima Australia. Ia beralasan bahwa penyadapan ini dilakukan untuk membantu teman dan sekutu. Seperti yang diberitakan dalam Harian Umum *The Jakarta Post* tanggal 19 November 2013.

All governments gather information, and all governments know that every other government gathers information,” he said as quoted by the Associated Press. “The Australian government uses all the resources at its disposal — including information — to help our friends and our allies, not to harm them, he added.

Akibat dari penyadapan yang dilakukan oleh Australia, Indonesia memanggil Kedutaan Besar RI yang berada di Australia, Marty Natalegawa untuk kembali ke Indonesia. Mengenai penarikan Kedubes RI, Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya kepada *tribunnews.com* mengapresiasi langkah pemerintah untuk

menarik duta besar Indonesia di Australia terkait penyadapan, meskipun terlambat.

Tantowi mengatakan penarikan itu diperlukan karena pemerintah Australia telah menganggap remeh masalah penyadapan. 'Dengan penarikan duta besar Indonesia untuk Australia, itu berarti selangkah lagi Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia'. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali, kata Tantowi.

Masyarakat dengan mudahnya mendapatkan informasi melalui berita di media massa. Berita (*news*) merupakan produk jurnalistik yang bertujuan untuk memenuhi khalayak akan informasi. Berita dikemas dari informasi yang aktual, faktual, penting, dan menarik sehingga dapat menarik para khalayak untuk membacanya.

Williard C. Bleyer dalam *Newspaper Writing and Editing* menjelaskan tentang definisi berita.

Berita adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, karena dia menarik minat atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar, atau karena dia dapat menarik para pembaca untuk membaca berita tersebut (Sumadiria, 2008: 64).

Menyangkut pemberitaan, pers dituntut menyampaikan fakta sosial secara objektif. Dalam penulisan berita, tidak sedikit wartawan memasukkan unsur subjektivitas serta ideologinya ke dalam berita. Dimensi emosional biasanya terpancing apabila suatu fakta mempunyai kedekatan secara psikologis ataupun geografis dengan wartawan.

Persoalannya kemudian adalah dimensi emosional dapat mengusur suatu berita. Namun betapa sulitnya membayangkan sebuah berita dapat objektif terhadap semua pihak dan fakta yang diberitakan. Objektivitas harus tetap

menjadi tolak ukur utama dalam memaparkan fakta sosial menjadi sebuah berita objektif.

Menurut Kovach, ada beberapa prinsip nyata yang disetujui wartawan dan menjadi hak anggota masyarakat untuk berharap. Prinsip-prinsip ini menyusut dan mengalir seiring waktu, namun mereka dalam beberapa batas tertentu mudah dipahami. Tujuan utama di antara semua tujuan jurnalisme adalah menyediakan informasi yang diperlukan orang agar bebas dan bisa mengatur diri sendiri. Prinsip-prinsip ini adalah sembilan elemen jurnalisme, yaitu:

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran.
2. Loyalitas pertama jurnalisme kepada warga.
3. Intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi.
4. Para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita.
5. Jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan.
6. Jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga.
7. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting, menarik, dan relevan.
8. Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional.
9. Para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka (Kovach, 2001: 5-6)

Surat kabar sebagai media cetak menjadi media yang paling diminati oleh masyarakat, karena surat kabar adalah media yang paling murah diantara media cetak lain seperti majalah, tabloid, dan sebagainya. Selain itu, surat kabar mampu menyajikan informasi atau berita secara komprehensif, bisa dibawa ke mana-mana, bisa didokumentasikan, bisa dibaca berulang-ulang, dan mudah diperoleh jika diperlukan. Definisi surat kabar menurut Suryawati (2011: 40) “Media komunikasi yang berisikan informasi dari berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, kriminal, budaya, seni, olahraga, luar negeri, dalam negeri, dan sebagainya”.

Berita dapat dipublikasikan melalui media apapun, baik media cetak ataupun elektronik. Namun yang menjadi masalahnya adalah berita yang

dipublikasikan melalui media elektronik kurang begitu objektif, karena media elektronik lebih mengutamakan kecepatan daripada keakurasian suatu berita.

Secara konseptual, pemberitaan surat kabar perlu dilandasi oleh prinsip mengutamakan kepentingan khalayak. Berdasarkan prinsip inilah para wartawan untuk mengerahkan segala sumber daya mereka untuk melaporkan peristiwa dan pernyataan yang akan menguntungkan khalayak tanpa subjektivitas wartawan.

Tanggungjawab wartawan untuk menyampaikan berita yang objektif juga ditegaskan dalam rumusan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1, yakni, “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

Menurut Mitchell V. Charnley dalam bukunya *Reporting*, kualitas berita meliputi:

1. *Accurate* (Akurat)

Keakuratan fakta berarti bahwa setiap pernyataan dalam berita, nama orang dan hari, tanggal, bulan, dan tahun peristiwa, usia, kutipan kalimat definitif atau setiap ekspresi, dan kata-kata harus tepat dan tanpa keraguan.

2. *Balanced* (Seimbang)

Berita yang disampaikan kepada pembaca harus jujur dan apa adanya, dalam hal ini berarti seimbang. Sebagai wakil dari pembaca, wartawan harus terus berusaha memberi setiap fakta dan memberi tekanan yang tepat, meletakkannya dalam hubungan yang tepat dengan fakta yang lain, dan menyusunnya secara berhubungan untuk memberi arti berita secara keseluruhan.

3. *Objective* (Objektif)

Objektif disini dapat diartikan bahwa berita berasal dari tulisan yang bersih dari prasangka perorangan atau pengaruh luar yang akan membuat berita kelihatan bukan yang sebenarnya.

4. *Concise & Clear* (Singkat & Jelas)

Singkat dan jelasnya sebuah berita haruslah mengikuti konstruksi berita. Berita harus merupakan satu kesatuan, ringkas, jelas dan sederhana. Berita yang ditulis berlebih-lebihan, tidak teratur atau bermakna ganda berarti tidak memiliki karakteristik kualitas berita. Berita harus ditulis apa adanya, tepat, pendek, dan bertalian logis.

5. *Recent* (Kebaruan/Aktual)

Pengertian aktual atau terbaru mempunyai arti yang relatif. Terbaru bukan hanya berarti baru terjadi, karena suatu peristiwa yang terjadi puluhan tahun yang lalu, akan menjadi berita yang menarik perhatian pembaca, jika ditemukan fakta yang baru mengenai peristiwa yang terjadi (Charnley, 1965 : 25-30).

Dari kelima kualitas berita diatas, peneliti tertarik untuk memilih kualitas berita dari segi objektivitas. Menurut McQuail, makna prinsip objektivitas berasal dari berbagai sumber. Oleh karena itu, prinsip tersebut mengandung sekian banyak pengertian, antara lain objektivitas merupakan nilai sentral yang mendasari disiplin profesi yang dituntut oleh para wartawan itu sendiri.

Objektivitas juga disebut-sebut sebagai prinsip yang sangat dihargai dalam kebudayaan modern secara luas. Hal ini tampak dari penerapan objektivitas pada berbagai bidang (tidak hanya bidang komunikasi massa dan media), terutama yang berkaitan langsung dengan rasionalitas ilmu pengetahuan dan birokrasi. Penerapan objektivitas secara penuh menandakan tingginya kualitas informasi yang akan diperoleh pembaca itu sendiri.

Objektivitas dalam berita menjadi sesuatu yang mutlak. Hal ini karena berita diletakkan pada fungsi mencerminkan atau melaporkan fakta dan realitas sosial. Dalam dunia media, ada kebiasaan yang sudah lazim untuk mengenali dan mempertemukan tuntutan realitas dan potensi isi berita. Harapan tertinggi tentang 'kebenaran realitas' dilekatkan pada 'berita' dan 'informasi' (McQuail, 1987: 186).

Sesuai dengan judul yang peneliti ambil, maka penelitian untuk menilai objektif atau tidak dari suatu pemberitaan adalah diukur dengan melihat kategori objektivitas. Peneliti bermaksud mengadakan penelitian terhadap objektivitas dalam pemberitaan spionase yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia pada Harian Umum *The Jakarta Post*. Harian Umum *The Jakarta Post* merupakan

salah satu media cetak bertaraf internasional. *The Jakarta Post* diterbitkan setiap hari dengan menggunakan bahasa Inggris sehingga *The Jakarta Post* ditujukan tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tetapi juga kepada khalayak yang berada di luar Indonesia.

Harian Umum *The Jakarta Post* dirancang untuk bacaan masyarakat internasional sehingga berbagai peristiwa penting dan menarik menjadi pilihan untuk ditampilkan. Warga asing di Indonesia pun dapat mengikuti perkembangan berita yang ada di Indonesia tanpa harus membaca Harian Umum berbahasa Indonesia yang terasa sulit bagi mereka untuk mencerna berita tersebut.

Sebagai harian umum, *The Jakarta Post* menyajikan pemberitaan yang baik dan berkualitas. Tidak sembarangan peristiwa bisa menjadi sorotan *The Jakarta Post*. Pers *The Jakarta Post* pun mempunyai standar pemberitaan yang harus diambil. Pers punya tanggung jawab atas berbagai peristiwa yang disajikan untuk konsumsi internasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemberitaan yang mengandung hal-hal negatif.

Sebagai Harian Umum dengan Bahasa Internasional, *The Jakarta Post* saat ini sudah mencapai ke beberapa negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Harian Umum *The Jakarta Post* juga menjadi koran wajib yang harus dimiliki oleh setiap Kedutaan Besar (Kedubes) seluruh negara yang berada di Jakarta untuk melihat perkembangan berita yang terjadi baik di Indonesia ataupun di luar negeri.

Maka sangat penting bagi peneliti untuk meneliti spionase yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia dalam Harian Umum *The Jakarta Post*, peneliti

ingin mencoba meneliti tentang unsur objektivitas yang ada dalam pemberitaan ini. Meskipun Harian Umum *The Jakarta Post* ini bertaraf internasional, namun ketika dihadapkan dengan pemberitaan terkait negara Indonesia, objektivitas menjadi hal yang sangat penting, karena wartawan *The Jakarta Post* kebanyakan orang Indonesia, sedangkan Harian Umum *The Jakarta Post* ini sudah sampai ke beberapa negara luar. Kredibilitas harian umum *The Jakarta Post* sebagai harian umum internasional akan turun apabila dalam pemberita spionase yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia diberitakan tidak objektif.

Media masih sulit untuk menghindari keberpihakan, terlebih lagi ketika yang diberitakannya pemilik media, pasti media tersebut tidak akan bisa menghindari adanya keberpihakan. Seharusnya, media lebih memperhatikan objektivitas untuk memberitakan informasi yang sesuai dengan kenyataan yang ada kepada masyarakat. Karena menurut Charnley (1965: 25), berita yang objektif berasal dari tulisan yang bersih dari prasangka perorangan atau pengaruh luar yang akan membuat berita kelihatan bukan yang sebenarnya. Namun, pada kenyataannya, netralitas pada media sulit untuk melakukan hal itu karena media mulai digunakan pemilik untuk mengitmdasi pemberitaan terkait dirinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mengkaji unsur objektivitas pemberitaan spionase Australia terhadap Indonesia pada Harian Umum *The Jakarta Post* dengan meneliti empat unsur objektivitas, yakni kebenaran, relevansi, keseimbangan, dan netralitas.

1.2 Identifikasi Masalah

Penjelasan yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Unsur Objektivitas Pada Pemberitaan Spionase Australia terhadap Indonesia di Harian Umum *The Jakarta Post* edisi 14 November 2013-30 November 2013 ditinjau dari Objektivitas Berita?”

Sedangkan untuk identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana objektivitas pemberitaan spionase Australia terhadap Indonesia di Harian Umum *The Jakarta Post* ditinjau dari aspek kebenaran?
2. Bagaimana objektivitas pemberitaan spionase Australia terhadap Indonesia di Harian Umum *The Jakarta Post* ditinjau dari aspek relevansi?
3. Bagaimana objektivitas pemberitaan spionase Australia terhadap Indonesia di Harian Umum *The Jakarta Post* ditinjau dari aspek keseimbangan?
4. Bagaimana objektivitas pemberitaan spionase Australia terhadap Indonesia di Harian Umum *The Jakarta Post* ditinjau dari aspek netralitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui objektivitas pemberitaan spionase Australia terhadap Indonesia di Harian Umum *The Jakarta Post* ditinjau dari aspek kebenaran.

2. Untuk mengetahui objektivitas pemberitaan spionase Australia terhadap Indonesia di Harian Umum *The Jakarta Post* ditinjau dari aspek relevansi.
3. Untuk mengetahui objektivitas pemberitaan spionase Australia terhadap Indonesia di Harian Umum *The Jakarta Post* ditinjau dari aspek keseimbangan.
4. Untuk mengetahui objektivitas pemberitaan spionase Australia terhadap Indonesia di Harian Umum *The Jakarta Post* ditinjau dari aspek netralitas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perkembangan ilmu komunikasi dalam pemberitaan melalui media massa khususnya media cetak. Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu jurnalistik sehingga dapat memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya tentang bagaimana pers mempublikasikan suatu informasi khususnya berita secara objektif agar beritanya menjadi berkualitas, sekaligus sebagai masukan untuk memperkaya wacana tentang objektivitas dalam kaitannya dengan tanggungjawab dan etika pers.

Manfaat Praktis

Penelitian dengan menggunakan analisis isi, akan banyak memberikan sumbangan kepada pertumbuhan dan perkembangan jurnalistik di Indonesia. Bagi redaksi Harian Umum *The Jakarta Post* sebagai harian umum bertaraf internasional khususnya dan semua surat kabar nasional pada umumnya, hasil

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menjalankan fungsinya sebagai informasi yang berimbang dalam memberitakan mengenai spionase yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Bagaimana jurnalis Indonesia pada umumnya dan Harian Umum *The Jakarta Post* pada khususnya diharapkan dapat menjadi masukan untuk merefleksikan kembali hubungan antara visi dan misi yang diembannya dengan memberitakan sesuatu dengan berimbang, tanpa adanya kepentingan suatu pihak.

1.5 Ruang Lingkup dan Pengertian Istilah

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi salah pengertian, maka peneliti melakukan pembatasan masalah agar penelitian ini menjadi lebih fokus kepada permasalahan dan tepat pada tujuan yang diharapkan.

1. Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah pemberitaan spionase yang terjadi antara Australia dengan Indonesia, ditinjau dari objektivitas yang meliputi aspek kebenaran, relevansi, keseimbangan, dan netralitas.
2. Objek penelitian adalah berita spionase Australia-Indonesia secara umum yang terdapat di Harian Umum *The Jakarta Post*.
3. Edisi yang dijadikan objek penelitian yaitu berita spionase Australia-Indonesia pada tanggal 14 November 2013 – 30 November 2013.
4. Surat kabar yang diteliti dibatasi, hanya Harian Umum *The Jakarta Post*. Sebuah media cetak nasional berbahasa Inggris yang eksistensinya sudah diakui oleh masyarakat Indonesia maupun warga asing yang berada di Indonesia.

5. Untuk mengetahui apakah surat kabar telah menerapkan prinsip objektivitas atau belum, peneliti melakukan penelitian mengenai objektivitas di surat kabar nasional berbahasa Inggris yang sudah memiliki pasar internasional, karena objektivitas merupakan hal yang harus dimiliki oleh sebuah berita.

Pengertian istilah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Harian Umum* adalah surat kabar yang terbit tiap-tiap hari (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
2. *The Jakarta Post* adalah sebuah harian berbahasa Inggris di Indonesia. Harian ini dimiliki oleh PT Bina Media Tenggara yang berkantor pusat di Jakarta (Wikipedia Indonesia).
3. Berita adalah pencatatan dari informasi yang paling penting serta cermat yang dapat diperoleh tentang gejala apa yang dipikirkan dan dikatakan, dilihat dan digambarkan, direncanakan dan dikerjakan orang (Stewart Robertson dan George Fox Mott, dalam Sobur, 1999).
4. Berita utama adalah berita yang ditempatkan pada halaman awal dengan headline (judul berita) di cetak tebal dan besar (Assegaff, 1982: 32).
5. Objektivitas ialah nilai sentral yang mendasari disiplin profesi yang dituntut oleh para wartawan sendiri; prinsip itu sangat dihargai dalam kebudayaan modern, termasuk berbagai bidang di luar bidang media massa, terutama dalam kaitannya dengan rasionalitas ilmu pengetahuan dan birokrasi; objektivitas mempunyai korelasi dengan independensi; prinsip tersebut sangat dihargai bilamana kondisi keanekaragaman

mengalami kemunduran, yaitu kondisi yang diwarnai oleh semakin menurunnya jumlah sumber dan semakin meningkatnya uniformitas (dengan kata lain situasi monopolitas semakin tampak). (McQuail, 1996: 129)

6. Spionase adalah suatu praktik untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Yang membedakan spionase dengan bentuk pengumpulan informasi intelijen lainnya adalah bahwa spionase bisa mengumpulkan informasi dengan mengakses tempat di mana informasi tersebut disimpan atau orang yang mengetahui mengenai informasi tersebut dan akan membocorkannya melalui berbagai dalih.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori Media Emansipatoris

Prinsip dasar teori ini dalam menyatukan koalisi yang lemah merujuk kepada partisipasi, interaksi, skala yang kecil, penempatan, otonomi, dan keragaman budaya, emansipasi, dan menolong diri sendiri. Penekanannya sering kali pada proses berkomunikasi alih-alih konten yang ditentukan sendiri oleh individu.

Ide-ide mengenai media baru dan berskala kecil ini umumnya diterapkan kepada masyarakat demokratis yang kaya dan yang memiliki banyak media. Sebagian besar dunia tidak seperti ini. Masih terdapat ruang bagi teori yang membahas kondisi perjuangan atas hak-hak dasar. (McQuail, 2011: 202).

Teori media emansipatoris berupaya untuk menjelaskan bagaimana suatu media berpartisipasi dan dapat bersifat kritis terkait suatu isu yang sedang hangat. Pengguna media dalam teori ini juga dapat memberi masukan apakah isu tersebut

layak untuk diangkat atau tidak karena sebagai pengguna media, kita juga harus aktif dan pandai dalam memilah-milah isu.

Teori Klasik

Ilmu komunikasi memiliki beberapa paradigma. Teori ataupun penelitian komunikasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa paradigma, salah satunya yaitu *classical paradigm* (paradigma klasik), yang mencakup *positivism* dan *post positivism*.

Peneliti yang menggunakan paradigma klasik dalam penelitiannya harus dapat menempatkan diri sebagai *value free researcher*, memisahkan nilai-nilai subyektif yang dimiliki dengan fakta obyektif yang diteliti. Paradigma klasik menilai, tujuan penelitian adalah memperoleh pengetahuan yang obyektif, memiliki signifikansi akademis, praktis dan metodologis.

Ada beberapa detail yang terdapat dalam paradigma klasik yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Ontologis

Adanya realitas nyata yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal walaupun kebenaran pengetahuan tentang itu mungkin hanya bisa diperoleh secara probabilistik.

2. Aspek Epistemologis

Ada realitas obyektif, sebagai suatu realitas yang external di luar diri peneliti. Peneliti harus sejauh mungkin membuat jarak dengan obyek penelitian.

3. Aspek Axiologis

Pertama, nilai, etika dan pilihan moral harus berada di luar proses penelitian. *Kedua*, peneliti berperan sebagai *disinterested scientist*. *Ketiga*, tujuan penelitian digunakan untuk eksplanasi, prediksi, dan kontrol.

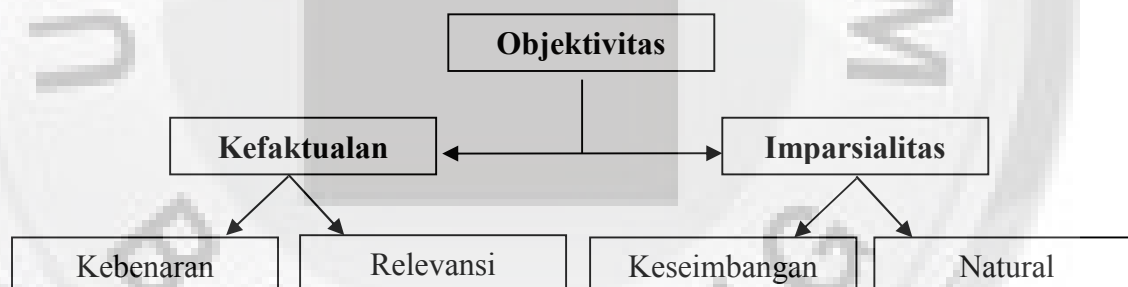
4. Aspek Metodologis

Pengujian hipotesis dalam struktur *hypothetico deductive method*; melalui lab, eksperimen atau survey eksplanatif, dengan analisis kuantitatif (Hidayat, 1999: 39-40).

Teori Objektivitas

Menyangkut prinsip penilaian, objektivitas memang hanya mempunyai cakupan yang lebih kecil dibanding dengan prinsip lain, tapi prinsip objektivitas memiliki fungsi yang tidak boleh dianggap sepele, terutama dalam kaitannya dengan kualitas informasi. Objektivitas pada umumnya berkaitan dengan berita dan informasi, sedangkan keanekaragaman berkaitan dengan segenap bentuk keluaran (*output*) media

Prinsip ini seperti dikemukakan oleh J. Westerthal (1983) dalam skema dibawah ini :



**Gambar 1.1: Komponen Kriteria Objektivitas
(dalam McQuail, 1996: 129)**

McQuail menjelaskan bahwa **kefaktualan** yang merupakan komponen yang penting dalam objektivitas dikaitkan dengan pelaporan tentang peristiwa atau pernyataan yang dapat diperiksa kebenarannya pada narasumber dan disajikan tanpa komentar atau disertai opini wartawan.

Relevansi menurut McQuail dijelaskan lebih sulit ditentukan dan dicapai secara objektif. Namun demikian pada dasarnya relevansi sama pentingnya

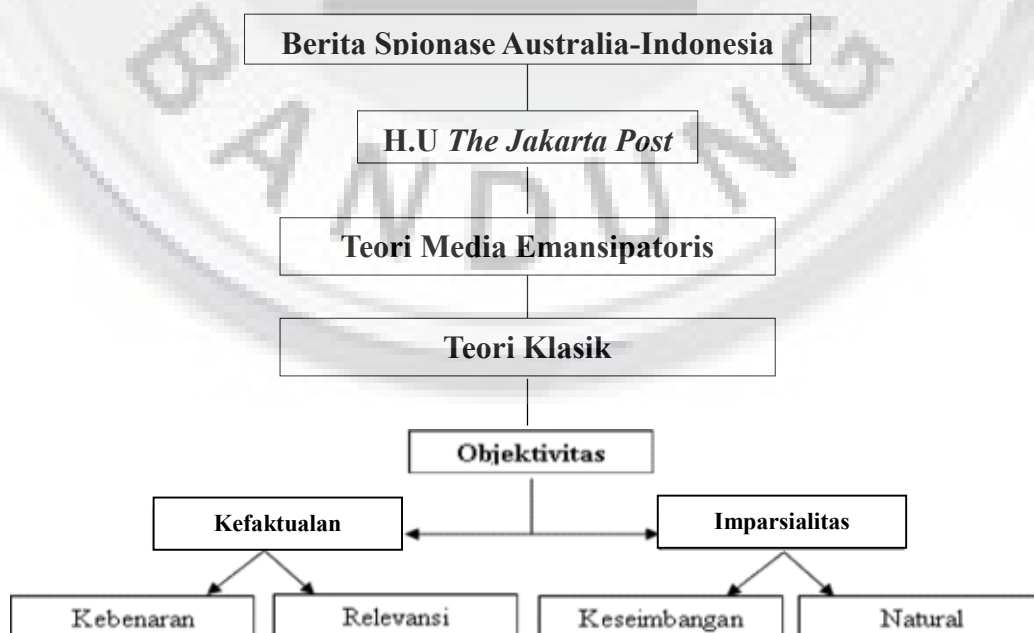
dengan kebenaran dan berkenaan dengan proses seleksi bukannya dalam bentuk penyajian relevansi.

Imparsialitas dihubungkan dengan sikap netral reporter, sikap menjauhkan setiap penilaian pribadi dan subjektif demi pencapaian sasaran. Sikap itu ditunjang oleh pelaporan yang seimbang (*both-sides covering*) dan tidak berpihak (McQuail, 1996: 130).

Keseimbangan berita berkenaan dengan sumber berita. Keseimbangan berarti tidak memihak, fair dan apa adanya (Lesmana, 1985: 126). Keseimbangan merupakan komponen dari imparsialitas yang diukur dengan menggunakan kategori sumber berita untuk mengetahui apakah berita tersebut bersifat berpihak atau memihak pada suatu golongan tertentu.

Sedangkan **netralitas** isi berita erat kaitannya dengan bentuk penulisan berita, sebab mencerminkan cara dan sikap wartawan dalam menulis berita.

Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 1.2: Alur Kerangka Pemikiran Penelitian